

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2023**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR (KOMISI I)	• Proses penyusunan di Komisi I • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR (ANGGOTA)	• RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi II • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (KOMISI III)	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR (KOMISI IV)	• Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 7 Juli 2022 • Menunggu Surpres • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR (KOMISI VI)	• RUU dalam tahap Harmonisasi di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	DPR (KOMISI VI)	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan)	DPR (KOMISI VII)	• Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 14 Juni 2022 • Menunggu Surpres • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR (KOMISI VIII)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	DPR (KOMISI IX)	• Proses penyusunan di Komisi IX • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10	DPR (KOMISI X)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.		
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>omnibus law</i>) [dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>omnibus law</i>)	DPR (KOMISI XI)	• Selesai harmonisasi di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022 <i>Omnibus Law</i>
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR (BADAN LEGISLASI)	• Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 30 September 2021 • Pembicaraan Tk. I di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR (BADAN LEGISLASI)	• Proses penyusunan di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia	DPR (BADAN LEGISLASI)	• Proses penyusunan di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	• Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (<i>Omnibus Law</i>) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional)	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023 <i>Omnibus Law</i>
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Ombudsman Republik Indonesia		
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.	DPR (ANGGOTA)	• Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.	DPR (ANGGOTA)	• Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 30 Juni 2022
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.	DPR (ANGGOTA)	Diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH	• RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	PEMERINTAH	• RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.	PEMERINTAH	• RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	PEMERINTAH	• SurPres sudah disampaikan ke DPR • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.	PEMERINTAH	• Dalam proses permohonan SurPres • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Wabah.	PEMERINTAH	• Dalam proses Permohonan SurPres • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	PEMERINTAH	• SurPres sudah diterima DPR • Proses Pendalaman di internal Pemerintah • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	PEMERINTAH	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	PEMERINTAH	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DPD	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	• RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Pansus • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah.	DPD	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEEMPAT
TAHUN 2020-2024**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.	DPR	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia.	DPR	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut.	DPR	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan.	DPR	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Tugas Perbantuan Militer.	DPR	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	DPR	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Paradiplomasi.	DPR	
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.	DPR	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR	
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD.	DPR	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.	DPR	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah.	DPR	
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria.	DPR	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	DPR	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.	DPR	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Terpadu Mandiri.	DPR	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	DPR	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	DPR	
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan.	DPR	
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	DPR	
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim.	DPR	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	DPR	
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.	DPR	
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan.	DPR	
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	DPR	
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum.	DPR	
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	DPR	
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	DPR	
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR	
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	DPR	
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.	DPR	
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Perkawinan.	DPR	
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.	DPR	
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan.	DPR	
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	DPR	
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
40.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	DPR	
41.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan.	DPR	
42.	Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	DPR	
43.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.	DPR	
44.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan.	DPR	
45.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	DPR	
46.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan.	DPR	
47.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	DPR	
48.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	DPR	
49.	Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Daring.	DPR	
50.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional.	DPR	
51.	Rancangan Undang-Undang tentang Sanitasi.	DPR	
52.	Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan.	DPR	
53.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Perumahan dan Kawasan Permukiman.		
54.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR	
55.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.	DPR	
56.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	DPR	RUU <i>Carry Over</i>
57.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Tenaga Surya.	DPR	
58.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR	
59.	Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup.	DPR	
60.	Rancangan Undang-Undang tentang Kendaraan Listrik.	DPR	
61.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial.	DPR	
62.	Rancangan Undang-Undang tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial.	DPR	
63.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR	
64.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.	DPR	
65.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	DPR	
66.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34	DPR/ PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.		
67.	Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	DPR	
68.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perindustrian Nasional.	DPR	
69.	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional.	DPR	
70.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.	DPR	
71.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara.	DPR	
72.	Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol.	DPR	
73.	Rancangan Undang-Undang tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual.	DPR	
74.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	DPR	
75.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengasuhan Anak.	DPR	
76.	Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial.	DPR	
77.	Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama.	DPR	
78.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	DPR	
79.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	DPR	
80.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.	DPR	
81.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (<i>Omnibus Law</i>) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
82.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian.	DPR	Diusulkan untuk disesuaikan judulnya menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Apoteker (usul Anggota).
83.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	DPR	
84.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti).	DPR	
85.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.	DPR	
86.	Rancangan Undang-Undang tentang Buruh Pertanian/Perkebunan.	DPR	
87.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat.	DPR	
88.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.	DPR	
89.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawas Ketenagakerjaan.	DPR	
90.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan.	DPR	
91.	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.	DPR	
92.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR	
93.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan.	DPR	
94.	Rancangan Undang-Undang tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan.	DPR	
95.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
96.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam.	DPR	
97.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.	DPR	
98.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.	DPR	
99.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.	DPR	
100.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.	DPR	
101.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Talenta Nasional.	DPR	
102.	Rancangan Undang-Undang tentang Persepakbolaan.	DPR	
103.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.	DPR	
104.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	DPR	
105.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.	DPR	
106.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Nasional.	DPR	
107.	Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR	
108.	Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Keuangan (<i>Financial Technology</i>).	DPR	
109.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		
110.	Rancangan Undang-Undang tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan.	DPR	
111.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.	DPR	
112.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.	DPR	
113.	Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah.	DPR	
114.	Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak.	DPR	
115.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.	DPR	
116.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	DPR	
117.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.	DPR	
118.	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Wisata Khusus.	DPR	
119.	Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kesusilaan.	DPR	
120.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Medis.	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
121.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim.	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
122.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Rancangan Undang-	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Undang tentang Penyelenggaraan Sumbangan)		
123.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Piutang Negara	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
124.	Rancangan Undang-Undang tentang Integrasi Data Pembangunan	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
125.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
126.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
127.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
128.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
129.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
130.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
131.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.	DPR/DPD	
132.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	DPR/DPD	
133.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
134.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	DPR/ PEMERINTAH	
135.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.	DPR/ PEMERINTAH	
136.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional.	DPR/ PEMERINTAH	
137.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	DPR/ PEMERINTAH	
138.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.	DPR/ PEMERINTAH	
139.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional.	DPR/ PEMERINTAH	
140.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	DPR	
141.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara. (<i>Omnibus Law</i>)	DPR/ PEMERINTAH	(<i>Omnibus Law</i>)
142.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.	DPR/ PEMERINTAH	
143.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.	DPR	
144.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	DPR/ PEMERINTAH	RUU <i>Carry Over</i>
145.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	DPR/ PEMERINTAH	RUU <i>Carry Over</i>
146.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas	DPR/ PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.		
147.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.	DPR/ PEMERINTAH	
148.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.	DPR/ PEMERINTAH	
149.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.	DPR	
150.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.	DPR	
151.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani.	DPR	
152.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	DPR	
153.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
154.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.	DPR/ PEMERINTAH	
155.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	DPR/ PEMERINTAH	
156.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.	DPR/ PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
157.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	DPR/ PEMERINTAH	
158.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
159.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.	DPR/ PEMERINTAH	
160.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	DPR/ PEMERINTAH	
161.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.	DPR	
162.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	DPR/ PEMERINTAH	
163.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.	DPR/ PEMERINTAH	
164.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	DPR/ PEMERINTAH	
165.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	DPR/ PEMERINTAH	
166.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	DPR/ PEMERINTAH	
167.	Rancangan Undang-Undang tentang Bank Emas.	DPR/ PEMERINTAH	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
168.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.	DPR/DPD	
169.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.	DPR/DPD	
170.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.	DPR/DPD	
171.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.	DPR/DPD	
172.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	DPR/DPD	
173.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.	DPR/DPD	
174.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.	DPR/DPD	
175.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	DPR/DPD	
176.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR/DPD	
177.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.	DPR/DPD	
178.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Persaingan Usaha Tidak Sehat.		
179.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.	DPR/DPD	
180.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.	DPR/DPD	
181.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.	DPR/DPD	
182.	Rancangan Undang-Undang tentang Geologi.	DPR/DPD	
183.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	DPR/DPD	
184.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR/DPD	
185.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR/DPD	
186.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.	DPR/DPD	
187.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.	DPR/DPD	
188.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Pasien.	DPR/DPD	
189.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	DPR/DPD	
190.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	DPR/DPD	
191.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.	DPR/DPD	
192.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
193.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.	PEMERINTAH	
194.	Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara.	PEMERINTAH	
195.	Rancangan Undang-Undang tentang Persandian.	PEMERINTAH	
196.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Nasional.	PEMERINTAH	
197.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.	PEMERINTAH	
198.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	PEMERINTAH	
199.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan.	PEMERINTAH	
200.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.	DPR	
201.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	PEMERINTAH	
202.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH	
203.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	PEMERINTAH	
204.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi.	PEMERINTAH	
205.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha.	PEMERINTAH	
206.	Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak.	PEMERINTAH	
207.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.	PEMERINTAH	
208.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional.	PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
209.	Rancangan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual Komunal.	PEMERINTAH	
210.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara.	PEMERINTAH	
211.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.	PEMERINTAH	
212.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.	PEMERINTAH	
213.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.	PEMERINTAH	
214.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.	PEMERINTAH	
215.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (<i>Omnibus Law</i>).	PEMERINTAH	(<i>Omnibus Law</i>)
216.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.	PEMERINTAH	
217.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.	PEMERINTAH	
218.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender.	PEMERINTAH	
219.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal.	PEMERINTAH	
220.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	PEMERINTAH	
221.	Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	(<i>Omnibus Law</i>)

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
222.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan.	PEMERINTAH	
223.	Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis.	PEMERINTAH	
224.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.	PEMERINTAH	
225.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH	
226.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah.	PEMERINTAH	
227.	Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.	PEMERINTAH	
228.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlelengan.	PEMERINTAH	
229.	Rancangan Undang-Undang tentang Penilai.	PEMERINTAH	
230.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	PEMERINTAH	
231.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
232.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	PEMERINTAH/ DPD	
233.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Daya Saing Daerah.	DPD	
234.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah.	DPD	
235.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.	DPD	
236.	Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	DPD	
237.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	DPD	
238.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
239.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketransmigrasian.	DPD	
240.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa.	DPD	
241.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	DPD	
242.	Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat.	DPD	
243.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang.	DPD	
244.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	DPD	
245.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.	DPD	
246.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.	DPD	
247.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial.	DPD	
248.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah.	DPD	
249.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.	DPD	
250.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Daerah.	DPD	
251.	Rancangan Undang-Undang tentang Investasi Penanaman Modal Daerah.	DPD	
252.	Rancangan Undang-Undang tentang Pinjaman Daerah.	DPD	
253.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
254.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.	DPD	
255.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.	DPD	
256.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DPD	
257.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara.	DPD	
258.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Digital.	DPD	
259.	RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam.	DPD	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024

NO	DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang